

Makassar Ramah Difabel Menuju Kota Inklusif

Andi Ima Kesuma¹, Mauliadi Ramli², Andi Caezar Taddampali³

Universitas Negeri Makassar
Email: Andi.ima.kesuma@unm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang "Makassar ramah difabel menuju kota inklusi" yang berupaya untuk melihat Bagaimana upaya pemerintah dalam menjadikan kota Makassar ramah difabel Menuju Kota Inklusif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologi antropologi. Sumber data penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Gerakan Kesetaraan Disabilitas Indonesia di Sulawesi Selatan, dan dinas sosial dan pemerintah kota Makassar. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kota Makassar termasuk kota ramah di fabel namun masih perlu di tingkatkan dari segi infrastruktur dan aksesibilitas, namun kota Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk menjadi kota yang ramah difabel, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Makassar menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Rencana Aksi Disabilitas (RAD Disabilitas). Keterlibatan disabilitas dalam proses Musrenbang (perencanaan pembangunan lokal) sangat penting bagi kota untuk menjadi lebih inklusif. Dinas Sosial di Makassar mengkonfirmasi bahwa tiga proyek infrastruktur besar, Karebosi, Japparate, dan Smart Panyingkulu telah dilakukan pemerintah untuk menunjang kota ramah difabel menuju makassar sebagai kota inklusi.

Kata Kunci: difabel, kota Inklusif, Makassar

PENDAHULUAN

Kota merupakan sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dengan fasilitas yang ramah terhadap segala bentuk kebutuhan dasar manusia. Menurut CRPD (Convention on the right of person with disability). segala bentuk kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan teman difabel harus menjadi sesuatu hal yang wajib untuk di openuhi guna untuk mewujudkan sebuah kota yang setara akan pemenuhan kebutuhan. Dalam menciptakan sebuah kota yang ramah dengan aksesibilitas yang memadai, terdapat dua hal yang perlu di jamin kulaitasnya yaitu aksesibilitas dan mobilitas, dimana aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang dimana hal ini tidak hanya mengacu pada aspek fisik tapi juga pada sikap dan perlakuan kepada masyarakat difabel serta juga mengacu pada kebiasaan dan prosedur bekerja di tempat tersebut. (Nurfia Ayuni Abdullah, 2019) Fasilitas sendiri tergolong sebagai backbone dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Yang dimaksud sebagai pelayanan publik di sini meliputi "...penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta

pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. (joni dawud, 2019). Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk di antaranya UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat mengenai Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat pada Bagian Ketiga yaitu pasal 138-140. (Adi Suhendra, 2020) . Makassar saat ini dikategorikan sebagai kota inklusif yang ramah terhadap masyarakat umum juga bagi kaum disabilitas. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti aksesibilitas yang masih kurang baik dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi. (alpiamus ba'ka, 2023). Selain itu Wali Kota Makassar, mendapat pujian dari penasihat hak-hak disabilitas internasional AS karena fokus terhadap disabilitas dan upayanya dalam menjadikan Makassar sebagai kota inklusif. (Muhammad Hasanuddin, 2023). Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana pemerintah kota Makassar berupaya mewujudkan kota ramah difabel menuju kota inklusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi langsung di lapangan termasuk pengambilan data awal ke dinas sosial kota Makassar, kemudian melakukan wawancara kepada beberapa pihak di antaranya pemerhati difabel kota makassar, dan teman difabel yang ada di Kota Makassar dan juga pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas sosial kota Makassar. Serta melakukan dokumentasi. Setelah itu peneliti melakukan triangulasi data, display data analisis data, penyajian data sampai kepada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan . Secara administrasi, kota ini terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kota Makassar terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar . Perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai yang berada di antara dua sungai besar, yaitu sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang didiami suku Bugis, sedangkan perbatasan selatan didiami oleh suku Makassar. Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Bahasa mayoritas yang dituturkan oleh masyarakat di kota Makassar adalah Bahasa Melayu Makassar yang banyak menyerap unsur-unsur bahasa Sulawesi Selatan yang dituturkan oleh sebagian besar masyarakat kota ini. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C . Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi . Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan

naiknya air pasang . Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah sebagai berikut: Batas Utara: Kabupaten Maros Batas Timur: Kabupaten Maros Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Batas Barat: Selat Makassar Kota Makassar memiliki sejarah yang panjang sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan . Makassar dikenal mempunyai hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India, dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah.

Selain itu lokasi penelitian juga berada pada dinas sosila kota Makassar. Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial di Kota Makassar. Berikut adalah profil lengkap Dinas Sosial Kota Makassar: Tugas dan Fungsi: Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial. Menyelenggarakan pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Mengkoordinasikan program-program sosial dengan instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Membangun kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Program dan Kegiatan: Program Bantuan Sosial: Dinas Sosial Kota Makassar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan pangan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Program Rehabilitasi Sosial: Dinas Sosial Kota Makassar melakukan rehabilitasi sosial bagi individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial, seperti pecandu narkoba, tunawisma, dan anak jalanan. Program Perlindungan Sosial: Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti anak-anak terlantar, korban kekerasan, dan penyandang disabilitas. Program Pemberdayaan Masyarakat: Dinas Sosial Kota Makassar juga melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan ekonomi, dan pengembangan potensi masyarakat. Struktur Organisasi: Dinas Sosial Kota Makassar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, seksi-seksi, dan bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial. Dari data lapangan yang di dapatkan jumlah difabel di Kota Makassar masih tergolong cukup banyak, berikut data difabel yang peneliti dapatkan dari dinas Sosial Kota Makassar :

REKAP DATA DISABILITAS KOTA MAKASSAR TAHUN 2022	
Sumber data: Pendamping Rehsos & RT/RW setempat	
Ragam Disabilitas	Jumlah
Disabilitas Intelektual	109
Down Syndrome	37
Grahitia	48
Lambat Belajar	24
Disabilitas mental	144
Autis	27
Depresi	2
ODGJ	113
Skizofrenia	2
Disabilitas Sensorik	144
Rungu	28
Rungu, Wicara	72
Wicara	44
Disabilitas Sensorik, Netra	175
Low Vision	66
Total Blind	109
Disabilitas Fisik	538
Disabilitas Fisik	538
Disabilitas Fisik (Ex. Kusta)	551
Ex. Kusta Perintis	150
Ex. Kusta Dangko	401
Grand Total	1661

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar 2023

Dari rekap data di atas dapat dilihat bahwa disabilitas intelektual sebanyak 109 orang, disabilitas mental sebanyak 144, disabilitas sensorik 175, disabilitas fisik 538 dan disabilitas fisik ex kusta 551 orang sehingga Total penyandang diabilitas yang ada di Kota Makassar per 2022 sebanyak 1661 orang, angka ini tentunya harus mendapat perhatian lebih pemerintah untuk dapat memberikan hak dan akses yang baik bagi saudara kita yang penyandang disabilitas demi menuju kota ramah difabel dan kota Inklusi. Jika kita merujuk pada Indikator kota ramah difabel dapat bervariasi tergantung pada sumber dan konteksnya. (Dinas Sosial Kota Makassar, 2023)

Berikut adalah beberapa indikator kota ramah difabel, Partisipasi difabel: Kota ramah difabel harus memastikan partisipasi aktif difabel dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan difabel. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan difabel dalam perancangan penganggaran fasilitas sudah ada.. Beberapa Tahun yang lalu, koalisi Organisasi Disabilitas se-Kota Makassar menyerahkan daftar usulan kepada Kepala BAPPEDA Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2020 dan tahun berikutnya. Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi difabel dalam

perencanaan pembangunan Kota Makassar. Adapun anggota koalisi ini adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan PerDIK, Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna-rungu Indonesia, GERKATIN Makassar, Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia, ITMI Sulawesi Selatan, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pertuni Sulawesi Selatan, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan, Gemparkan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Sulawesi Selatan, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Sulawesi Selatan, Perhimpunan Mandiri Kusta, PerMaTa Makassar. Pustakabilitas Indonesia. Adapun bidang-bidang pembangunan yang dianggap penting oleh Difabel diantaranya: Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Ekonomi, Bidang Politik dan kewarganegaraan, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Informasi dan Komunikasi 9. Bidang Olah raga, Rekreasi dan Kesenian, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Teknologi Tepat Guna, dan Bidang Pengurangan Risiko Bencana. Data tersebut peneliti ambil dari hasil wawancara dengan ketua perdik dari hasil dari laporan RAD (Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar tahun 2020-2026).

Makassar telah mengambil langkah-langkah untuk menjadi kota yang ramah bagi difabel. Berikut adalah informasi yang dapat ditemukan dari hasil pencarian: Penghargaan Kota Ramah Disabilitas: Pada tahun sebelumnya, Kota Makassar telah menerima penghargaan sebagai kota ramah disabilitas . Hal ini menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi difabel di kota ini. Analisis Anggaran: Warga difabel di Makassar telah menganalisis anggaran belanja dan pendapatan pemerintah kota untuk memastikan keberpihakan terhadap isu disabilitas . Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan difabel. Riset dan Fokus Pembangunan: PerDIK (Perkumpulan Disabilitas Kota Makassar) telah melakukan riset dan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor pembangunan yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Makassar, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki akses dan layanan bagi difabel di berbagai sektor. RAD Disabilitas: Makassar menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki RAD (Rumah Aksesibilitas Difabel). (Makassar, 2023). Ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas yang ramah dan aksesibel bagi difabel. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan dalam menjadikan Makassar sebagai kota yang ramah bagi difabel, informasi lebih lanjut mengenai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar atau instansi terkait dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kesiapan kota ini dalam hal ini. Kepala dinas sosial Kota Makassar.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan kota ramah difabel menuju kota inklusi, di antaranya: Inisiatif BAPPEDA

Kota Makassar: BAPPEDA Kota Makassar telah menginisiasi pelibatan Organisasi Pemerhati Disabilitas dalam upaya mewujudkan kota inklusi. Konsep Kota Inklusi: Pemerintah Kota Makassar telah mencoba menggunakan dan mengembangkan konsep Kota Inklusi, yaitu kondisi kehidupan penyandang disabilitas di kota yang warganya menjunjung kesetaraan, saling menghargai, dan merangkul setiap perbedaan. Rencana Aksi Daerah (RAD): Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar sedang menyiapkan RAD lima tahunan yang akan dikaitkan dengan RAN Penyandang Disabilitas. Dokumen RAD Penyandang Disabilitas Kota Makassar ini merupakan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh Bappeda Kota Makassar dengan Organisasi Pemerhati Disabilitas se-Kota Makassar. Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas: Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas merupakan gerakan sosial yang hadir untuk mendorong kebijakan daerah terkait dengan jaminan layak hidup bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Gerakan ini juga berupaya untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota inklusif yang ramah untuk penyandang disabilitas maupun kelompok minoritas lainnya. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah difabel: Pemerintah Kota Makassar sedang fokus untuk penanganan infrastruktur yang ramah difabel yang dimasukkan dalam perencanaan tahun depan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik harus memperhitungkan kelompok rentan, termasuk disabilitas. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala dalam mewujudkan kota ramah difabel menuju kota inklusi di Kota Makassar, seperti fasilitas publik yang masih banyak yang belum ramah difabel dan kurangnya koordinasi antar stakeholder. Oleh karena itu, keterlibatan difabel dalam Musrenbang, mulai di tingkat RT/RW, Kelurahan hingga Kecamatan, serta penganggaran yang berpihak kepada kelompok rentan khususnya difabel, menjadi syarat utama untuk menuju kota inklusi di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suhendra. (2020). Strategi Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. *Matra Pembaruan*.
- alpianus ba'ka. (2023, Oktober). *rri.co.id*. Retrieved from RRI: https://www.rri.co.id/daerah/423093/makassar-masih-memiliki-tantangan-untuk-jadi-kota-inklusif?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal_link&utm_source=popular_home
- Dinas Sosial Kota Makassar. (2023, September). *Dinas Sosial Kota Makassar*.
- joni dawud. (2019). STRATEGI PERWUJUDAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS: SEBUAH PERSPEKTIF AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal administrasi negara*, 142.
- Makassar, P. K. (2023, September). Upaya Pemerintah dalam mewujudkan kota ramah difabel.



- Muhammad Hasanuddin. (2023, oktober). *Antara*. Retrieved from antaranews.com:
<https://makassar.antaranews.com/berita/509967/dany-pomanto-makassar-telah-menjadi-salah-satu-kota-inklusif>
- Nurfia Ayuni Abdullah. (2019). Analisis spasial terhadap fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan difabel di kota Bitung. *jurnal spasial*.